



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Selasa

Tanggal: 09 Mei 2017

Halaman: 2

KOMUNITAS SUNGAI DUKUNG UPAYA PEMKOT Pembatasan Sempadan Bukan untuk Penggusuran

YOGYA (KR) - Rencana Pemkot Yogya yang hendak memberi batas atau penanda kawasan sempadan sungai, mendapat dukungan komunitas pegiat sungai. Namun, pembatasan sempadan bukan untuk mengusur melainkan supaya ada kekuatan hukum sebagai penegasan kawasan sungai.

Koordinator Forum Komunikasi Winongo Asri (FKWA), Oleg Johan, mengaku belum diajak berkomunikasi dengan Pemkot terkait rencana pemasangan penanda kawasan sempadan sungai. "Belum ada komunikasi, tapi komunitas pasti mendukung langkah itu," tandasnya, Senin (8/5).

Menurut Oleg, setiap sungai

yang mengalir di wilayah Kota Yogya sudah memiliki komunitas. Hanya, fungsinya masih sebatas melakukan edukasi, pendampingan serta fungsi sosial lainnya. Sedangkan untuk menindak setiap pelanggaran menjadi ranah Pemkot.

FKWA sudah rutin melaporkan setiap aktivitas pembangunan yang melanggar kawasan sempadan. Namun laporan itu juga belum ditindaklanjuti secara tegas. Oleh karena itu, jika kelak ada batas yang jelas serta regulasi yang tegas, maka bisa memudahkan dalam pemantauan. "Yang perlu dipahami itu kan, batas sempadan bukan untuk menggusur bangunan lama. Tapi sebagai penanda agar jangan ada

bangunan baru yang melanggar," imbuhnya.

Diakui, sepanjang belum ada penanda yang menunjukkan kawasan sempadan sungai, maka masih rentan terjadi pelanggaran. Oleg mencontohkan sepanjang Kali Winongo yang memiliki alur di Kota Yogya sekitar delapan kilometer, hanya 30 persen yang sempadannya ideal.

Sekretaris Komisi C DPRD Kota Yogya, Bambang Seno Baskoro, mengungkapkan penegasan garis sempadan sudah selayaknya diwujudkan. Tapi terhadap pemukiman penduduk yang sudah berdiri sebelumnya, perlu mempertimbangkan kearifan lokal.

"Bangunan baru memang

harus diantisipasi supaya tidak melanggar sempadan. Tapi yang sudah berdiri seperti banyak ditemui di pinggiran Kali Code, perlu ada kearifan lokal. Seperti kebijakan 'mundur munggah madep kali' atau M3K itu," paparnya.

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogya, Hari Setyawacana, kembali menegaskan pemasangan penanda sempadan baru akan dilakukan tahun 2018. (Dhi)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pertanahan dan Tata Ruan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005